



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 64 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/II/2014 tentang Kebutuhan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593);

17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau
3. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / kota se propinsi Riau
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Wali Kota se Propinsi Riau
5. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoranhewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

9. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
14. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
15. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota.

## BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

## BAB III PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### Pasal 4

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.

### Pasal 6

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

## Pasal 7

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani di wilayahnya.

## BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani.
  - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.

Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	Z A	N P K	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	27.717	9.344	7.711	36.098	7.215
2	HORTIKULTURA	1.635	757	602	5.024	898
3	PERKEBUNAN RAKYAT	6.116	3.261	3.374	10.711	1.641
4	PETERNAKAN	696	213	312	1.166	246
5	PERIKANAN BUDIDAYA	836	426	-	-	-
	Jumlah	<b>37.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>53.000</b>	<b>10.000</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	27.717	2.600	2.052	2.427	2.542	2.588	2.096	1.702	1.385	1.772	2.109	2.861	3.583
2	HORTIKULTURA	1.635	153	121	143	150	153	124	100	82	105	124	169	211
3	PERKEBUNAN	6.116	574	453	535	561	571	463	376	306	391	465	631	791
4	PETERNAKAN	696	65	52	61	64	65	53	43	35	44	53	72	90
5	PERIKANAN BUDIDAYA	836	78	62	73	77	78	63	51	42	53	64	86	108
	<b>Jumlah</b>	<b>37.000</b>	3.470	2.740	3.239	3.394	3.455	2.798	2.272	1.850	2.366	2.815	3.819	4.783

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	9.344	924	931	956	964	865	615	434	325	555	755	992	1.028
2	HORTIKULTURA	757	75	75	77	78	70	50	35	26	45	61	80	83
3	PERKEBUNAN	3.261	322	325	333	336	302	215	152	114	194	263	346	359
4	PETERNAKAN	213	21	21	22	22	20	14	10	7	13	17	23	23
5	PERIKANAN BUDIDAYA	426	42	42	44	44	39	28	20	15	25	34	45	47
	<b>Jumlah</b>	<b>14.000</b>	<b>1.384</b>	<b>1.394</b>	<b>1.432</b>	<b>1.445</b>	<b>1.296</b>	<b>921</b>	<b>651</b>	<b>488</b>	<b>831</b>	<b>1.131</b>	<b>1.486</b>	<b>1.541</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014 1

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	7.711	778	785	749	709	691	632	513	375	505	683	803	490
2	HORTIKULTURA	602	61	61	58	55	54	49	40	29	39	53	63	38
3	PERKEBUNAN	3.374	341	343	328	310	302	277	224	164	221	299	351	214
4	PETERNAKAN	312	31	32	30	29	28	26	21	15	20	28	32	20
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>12.000</b>	<b>1.211</b>	<b>1.221</b>	<b>1.165</b>	<b>1.103</b>	<b>1.075</b>	<b>983</b>	<b>798</b>	<b>583</b>	<b>786</b>	<b>1.063</b>	<b>1.250</b>	<b>762</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK N P K BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	36.098	3.238	3.734	3.762	3.941	3.263	2.851	2.011	1.407	2.002	2.772	3.431	3.685
2	HORTIKULTURA	5.024	451	520	524	549	454	397	280	196	279	386	478	513
3	PERKEBUNAN	10.711	961	1.108	1.116	1.169	968	846	597	418	594	823	1.018	1.093
4	PETERNAKAN	1.166	105	121	122	127	105	92	65	45	65	90	111	119
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>53.000</b>	<b>4.754</b>	<b>5.482</b>	<b>5.524</b>	<b>5.786</b>	<b>4.791</b>	<b>4.186</b>	<b>2.953</b>	<b>2.066</b>	<b>2.939</b>	<b>4.070</b>	<b>5.038</b>	<b>5.410</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	TANAMAN PANGAN	7.215	647	746	752	788	652	570	402	281	400	554	686	737
2	HORTIKULTURA	898	81	93	94	98	81	71	50	35	50	69	85	92
3	PERKEBUNAN	1.641	147	170	171	179	148	130	91	64	91	126	156	168
4	PETERNAKAN	246	22	25	26	27	22	19	14	10	14	19	23	25
5	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000</b>	<b>897</b>	<b>1.034</b>	<b>1.042</b>	<b>1.092</b>	<b>904</b>	<b>790</b>	<b>557</b>	<b>390</b>	<b>555</b>	<b>768</b>	<b>950</b>	<b>1.021</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran VII : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	SUB SEKTOR	SETAHUN	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	U R E A	37.000	3.470	2.740	3.239	3.394	3.455	2.798	2.272	1.850	2.366	2.815	3.819	4.783
2	SP - 36	14.000	1.384	1.394	1.432	1.445	1.296	921	651	488	831	1.131	1.486	1.541
3	Z A	12.000	1.211	1.221	1.165	1.103	1.075	983	798	583	786	1.063	1.250	762
4	N P K	53.000	4.754	5.482	5.524	5.786	4.791	4.186	2.953	2.066	2.939	4.070	5.038	5.410
5	ORGANIK	10.000	897	1.034	1.042	1.092	904	790	557	390	555	768	950	1.021

Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran VIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	4,44	0,42	0,33	0,39	0,41	0,41	0,34	0,27	0,22	0,28	0,34	0,46	0,574
2	Kampar	2.607	245	193	228	239	243	197	160	130	167	198	269	337
3	Rokan Hulu	4.105	385	304	359	377	383	310	252	205	262	312	424	531
4	Rokan Hilir	3.425	321	254	300	314	320	259	210	171	219	261	354	443
5	Indragiri Hulu	1.118	105	83	98	103	104	85	69	56	72	85	115	145
6	Indragiri Hilir	7.266	681	538	636	666	678	550	446	363	465	553	750	939
7	Kuantan Singingi	2.329	218	172	204	214	217	176	143	116	149	177	240	301
8	Pelalawan	2.534	238	188	222	232	237	192	156	127	162	193	262	327
9	Dumai	456	43	34	40	42	43	34	28	23	29	35	47	59
10	Bengkalis	1.627	153	120	142	149	152	123	100	81	104	124	168	210
11	Siak	1.625	152	120	142	149	152	123	100	81	104	124	168	210
12	Kepulauan Meranti	621	58	46	54	57	58	47	38	31	40	47	64	80
	<b>Jumlah</b>	<b>27.717</b>	<b>2.600</b>	<b>2.052</b>	<b>2.427</b>	<b>2.542</b>	<b>2.588</b>	<b>2.096</b>	<b>1.702</b>	<b>1.385</b>	<b>1.772</b>	<b>2.109</b>	<b>2.861</b>	<b>3.583</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran IX : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	61	6	5	5	6	6	5	4	3	4	5	6	8
2	Kampar	256	24	19	22	24	24	19	16	13	16	19	26	33
3	Rokan Hulu	118	11	9	10	11	11	9	7	6	8	9	12	15
4	Rokan Hilir	112	10	8	10	10	10	8	7	6	7	8	12	14
5	Indragiri Hulu	239	22	18	21	22	22	18	15	12	15	18	25	31
6	Indragiri Hilir	111	10	8	10	10	10	8	7	6	7	8	11	14
7	Kuantan Singingi	201	19	15	18	18	19	15	12	10	13	15	21	26
8	Pelalawan	131	12	10	11	12	12	10	8	7	8	10	13	17
9	Dumai	130	12	10	11	12	12	10	8	7	8	10	13	17
10	Bengkalis	118	11	9	10	11	11	9	7	6	8	9	12	15
11	Siak	102	10	8	9	9	10	8	6	5	7	8	11	13
12	Kepulauan Meranti	56	5	4	5	5	5	4	3	3	4	4	6	7
	<b>Jumlah</b>	<b>1.635</b>	<b>153</b>	<b>121</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>153</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>124</b>	<b>169</b>	<b>211</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran X : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	35	2	1	1	2	1	2	2	-	4	6	6	8
2	Kampar	1.150	30	30	35	35	35	30	29	190	186	202	202	146
3	Rokan Hulu	728	29	29	34	40	45	41	90	90	90	105	80	55
4	Rokan Hilir	864	24	20	20	45	35	40	90	95	100	120	135	140
5	Indragiri Hulu	580	26	18	21	18	21	20	25	75	75	85	96	100
6	Indragiri Hilir	781	25	22	30	37	40	34	30	100	115	115	105	128
7	Kuantan Singingi	420	23	15	20	20	18	21	18	45	45	50	70	75
8	Pelalawan	393	12	11	13	11	15	11	10	40	40	65	70	95
9	Dumai	55	3	3	2	2	3	3	4	4	4	5	6	16
10	Bengkalis	317	20	10	18	10	11	15	20	35	45	50	40	43
11	Siak	740	24	24	26	28	35	25	20	118	118	120	100	102
12	Kepulauan Meranti	53	2	2	2	4	2	2	1	7	8	8	7	8
	<b>Jumlah</b>	<b>6.116</b>	<b>220</b>	<b>185</b>	<b>222</b>	<b>252</b>	<b>261</b>	<b>244</b>	<b>339</b>	<b>799</b>	<b>830</b>	<b>931</b>	<b>917</b>	<b>916</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XI : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kampar	185	17	14	16	17	17	14	11	9	12	14	19	24
3	Rokan Hulu	93	9	7	8	9	9	7	6	5	6	7	10	12
4	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indragiri Hulu	74	7	5	6	7	7	6	5	4	5	6	8	10
6	Indragiri Hilir	93	9	7	8	9	9	7	6	5	6	7	10	12
7	Kuantan Singingi	93	9	7	8	9	9	7	6	5	6	7	10	12
8	Pelalawan	139	13	10	12	13	13	11	9	7	9	11	14	18
9	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bengkalis	19	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>696</b>	<b>65</b>	<b>52</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>90</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	73	7	5	6	7	7	6	4	4	5	6	8	9
2	Kampar	108	10	8	9	10	10	8	7	5	7	8	11	14
3	Rokan Hulu	75	7	6	7	7	7	6	5	4	5	6	8	10
4	Rokan Hilir	71	7	5	6	7	7	5	4	4	5	5	7	9
5	Indragiri Hulu	68	6	5	6	6	6	5	4	3	4	5	7	9
6	Indragiri Hilir	75	7	6	7	7	7	6	5	4	5	6	8	10
7	Kuantan Singingi	97	9	7	8	9	9	7	6	5	6	7	10	13
8	Pelalawan	86	8	6	8	8	8	6	5	4	6	7	9	11
9	Dumai	50	5	4	4	5	5	4	3	3	3	4	5	6
10	Bengkalis	77	7	6	7	7	7	6	5	4	5	6	8	10
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	56	5	4	5	5	5	4	3	3	4	4	6	7
	<b>Jumlah</b>	<b>836</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>86</b>	<b>108</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	1,50	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,10	0,07	0,05	0,09	0,12	0,16	0,16
2	Kampar	879	87	88	90	91	81	58	41	31	52	71	93	97
3	Rokan Hulu	1.384	137	138	142	143	128	91	64	48	82	112	147	152
4	Rokan Hilir	1.155	114	115	118	119	107	76	54	40	69	93	123	127
5	Indragiri Hulu	377	37	38	39	39	35	25	18	13	22	30	40	41
6	Indragiri Hilir	2.449	242	244	250	253	227	161	114	85	145	198	260	270
7	Kuantan Singingi	785	78	78	80	81	73	52	36	27	47	63	83	86
8	Pelalawan	854	84	85	87	88	79	56	40	30	51	69	91	94
9	Dumai	154	15	15	16	16	14	10	7	5	9	12	16	17
10	Bengkalis	549	54	55	56	57	51	36	25	19	33	44	58	60
11	Siak	548	54	55	56	57	51	36	25	19	33	44	58	60
12	Kepulauan Meranti	209	21	21	21	22	19	14	10	7	12	17	22	23
	<b>Jumlah</b>	<b>9.344</b>	<b>924</b>	<b>931</b>	<b>956</b>	<b>964</b>	<b>865</b>	<b>615</b>	<b>434</b>	<b>325</b>	<b>555</b>	<b>755</b>	<b>992</b>	<b>1.028</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XIV : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	28	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	3	3
2	Kampar	119	12	12	12	11	11	8	6	4	7	10	13	13
3	Rokan Hulu	55	5	5	6	5	5	4	3	2	3	4	6	6
4	Rokan Hilir	52	5	5	5	5	5	3	2	2	3	4	5	6
5	Indragiri Hulu	111	11	11	11	10	10	7	5	4	7	9	12	12
6	Indragiri Hilir	52	5	5	5	5	5	3	2	2	3	4	5	6
7	Kuantan Singingi	93	9	9	10	9	9	6	4	3	6	8	10	10
8	Pelalawan	61	6	6	6	6	6	4	3	2	4	5	6	7
9	Dumai	60	6	6	6	6	6	4	3	2	4	5	6	7
10	Bengkalis	55	5	5	6	5	5	4	3	2	3	4	6	6
11	Siak	47	5	5	5	4	4	3	2	2	3	4	5	5
12	Kepulauan Meranti	26	3	3	3	2	2	2	1	1	2	2	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>757</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>83</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XV : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Kampar	467	18	20	18	19	17	15	45	55	55	60	75	70
3	Rokan Hulu	389	23	22	22	20	22	15	15	45	50	55	55	45
4	Rokan Hilir	271	16	18	20	25	28	15	10	27	30	30	26	26
5	Indragiri Hulu	320	6	8	8	8	7	9	9	50	50	65	50	50
6	Indragiri Hilir	265	14	14	20	20	12	12	10	35	40	35	25	28
7	Kuantan Singingi	372	12	15	15	16	14	12	12	50	56	50	60	60
8	Pelalawan	327	4	5	5	8	5	5	4	60	60	65	50	56
9	Dumai	98	4	3	2	2	2	2	4	14	13	16	17	19
10	Bengkalis	212	8	9	4	4	5	3	3	30	33	33	35	45
11	Siak	488	19	18	16	16	15	14	17	85	90	95	50	53
12	Kepulauan Meranti	40	4	4	2	1	1	1	1	4	4	5	7	6
	<b>Jumlah</b>	<b>3.261</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>140</b>	<b>129</b>	<b>104</b>	<b>131</b>	<b>456</b>	<b>482</b>	<b>510</b>	<b>451</b>	<b>459</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XVI : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kampar	57	6	6	6	6	5	4	3	2	3	5	6	6
3	Rokan Hulu	28	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	3	3
4	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indragiri Hulu	23	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
6	Indragiri Hilir	28	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	3	3
7	Kuantan Singingi	28	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	3	3
8	Pelalawan	43	4	4	4	4	4	3	2	1	3	3	5	5
9	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bengkalis	6	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>213</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XVII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	20	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2
2	Kampar	63	6	6	7	7	6	4	3	2	4	5	7	7
3	Rokan Hulu	51	5	5	5	5	5	3	2	2	3	4	5	6
4	Rokan Hilir	44	4	4	5	5	4	3	2	2	3	4	5	5
5	Indragiri Hulu	38	4	4	4	4	3	2	2	1	2	3	4	4
6	Indragiri Hilir	57	6	6	6	6	5	4	3	2	3	5	6	6
7	Kuantan Singingi	45	4	5	5	5	4	3	2	2	3	4	5	5
8	Pelalawan	37	4	4	4	4	3	2	2	1	2	3	4	4
9	Dumai	27	3	3	3	3	2	2	1	1	2	2	3	3
10	Bengkalis	36	4	4	4	4	3	2	2	1	2	3	4	4
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	8	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>426</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>45</b>	<b>47</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XVIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	1	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,06	0,08	0,11	0,13	0,08
2	Kampar	725	73,20	73,80	70,42	66,65	64,98	59,44	48,23	35,24	47,54	64,27	75,53	46,06
3	Rokan Hulu	1.142	115,26	116,19	110,87	104,94	102,32	93,59	75,93	55,48	74,85	101,20	118,92	72,52
4	Rokan Hilir	953	96,17	96,95	92,51	87,56	85,38	78,10	63,36	46,29	62,45	84,44	99,23	60,51
5	Indragiri Hulu	311	31,40	31,66	30,21	28,59	27,88	25,50	20,69	15,12	20,39	27,57	32,40	19,76
6	Indragiri Hilir	2.021	204,00	205,66	196,24	185,73	181,10	165,66	134,40	98,20	132,48	179,11	210,48	128,35
7	Kuantan Singingi	648	65,38	65,91	62,89	59,53	58,04	53,09	43,07	31,47	42,46	57,40	67,46	41,14
8	Pelalawan	705	71,14	71,72	68,43	64,77	63,15	57,77	46,87	34,24	46,20	62,46	73,40	44,76
9	Dumai	127	12,80	12,91	12,32	11,66	11,37	10,40	8,44	6,16	8,32	11,24	13,21	8,06
10	Bengkalis	453	45,68	46,06	43,95	41,59	40,56	37,10	30,10	21,99	29,67	40,11	47,14	28,74
11	Siak	452	45,62	45,99	43,88	41,53	40,50	37,04	30,05	21,96	29,62	40,05	47,07	28,70
12	Kepulauan Meranti	173	17,43	17,57	16,77	15,87	15,48	14,16	11,48	8,39	11,32	15,31	17,99	10,97
	<b>Jumlah</b>	<b>7.711</b>	<b>778</b>	<b>785</b>	<b>749</b>	<b>709</b>	<b>691</b>	<b>632</b>	<b>513</b>	<b>375</b>	<b>505</b>	<b>683</b>	<b>803</b>	<b>490</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XIX : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	22	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1
2	Kampar	94	10	10	9	9	8	8	6	5	6	8	10	6
3	Rokan Hulu	43	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	5	3
4	Rokan Hilir	41	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3
5	Indragiri Hulu	88	9	9	9	8	8	7	6	4	6	8	9	6
6	Indragiri Hilir	41	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3
7	Kuantan Singingi	74	7	8	7	7	7	6	5	4	5	7	8	5
8	Pelalawan	48	5	5	5	4	4	4	3	2	3	4	5	3
9	Dumai	48	5	5	5	4	4	4	3	2	3	4	5	3
10	Bengkalis	43	4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	5	3
11	Siak	38	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	4	2
12	Kepulauan Meranti	20	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1
	<b>Jumlah</b>	<b>602</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>38</b>

Pit. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XX : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	19	1	1	1	2	1	2	2	-	2	3	2	2
2	Kampar	634	16	16	19	19	19	16	16	95	100	102	107	109
3	Rokan Hulu	402	16	16	19	22	25	23	58	58	60	30	35	40
4	Rokan Hilir	476	13	11	11	30	26	30	75	80	45	45	55	55
5	Indragiri Hulu	327	14	10	12	13	13	12	14	42	42	50	51	54
6	Indragiri Hilir	430	14	13	17	22	30	22	21	70	77	40	50	54
7	Kuantan Singingi	231	12	8	8	10	9	12	11	28	30	35	35	33
8	Pelalawan	217	7	7	9	7	11	10	10	35	35	25	30	31
9	Dumai	30	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
10	Bengkalis	188	7	5	6	5	6	10	12	25	25	30	25	32
11	Siak	408	13	13	15	16	15	12	10	65	65	70	60	54
12	Kepulauan Meranti	12	1	2	2	1	-	-	-	1	1	1	1	2
	<b>Jumlah</b>	<b>3.374</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	<b>121</b>	<b>149</b>	<b>157</b>	<b>151</b>	<b>233</b>	<b>503</b>	<b>486</b>	<b>433</b>	<b>453</b>	<b>468</b>

Pit. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXI : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kampar	83	8	8	8	8	7	7	6	4	5	7	9	5
3	Rokan Hulu	42	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3
4	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indragiri Hulu	33	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2
6	Indragiri Hilir	42	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3
7	Kuantan Singingi	42	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3
8	Pelalawan	62	6	6	6	6	6	5	4	3	4	6	6	4
9	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bengkalis	8	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>312</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>20</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	6	0,52	0,60	0,60	0,63	0,52	0,46	0,32	0,23	0,32	0,44	0,55	0,59
2	Kampar	3.396	304,59	351,22	353,88	370,72	306,94	268,21	189,20	132,36	188,29	260,75	322,74	346,63
3	Rokan Hulu	5.346	479,59	552,99	557,19	583,70	483,29	422,29	297,90	208,40	296,46	410,56	508,16	545,78
4	Rokan Hilir	4.461	400,17	461,43	464,93	487,05	403,26	352,37	248,58	173,89	247,37	342,58	424,02	455,40
5	Indragiri Hulu	1.457	130,67	150,67	151,81	159,03	131,67	115,06	81,17	56,78	80,77	111,86	138,45	148,70
6	Indragiri Hilir	9.463	848,85	978,78	986,20	1033,14	855,40	747,44	527,28	368,85	524,73	726,68	899,42	966,01
7	Kuantan Singingi	3.033	272,05	313,69	316,07	331,11	274,15	239,55	168,99	118,22	168,17	232,90	288,26	309,60
8	Pelalawan	3.300	296,00	341,31	343,90	360,27	298,29	260,64	183,87	128,62	182,98	253,40	313,64	336,86
9	Dumai	594	53,28	61,43	61,90	64,85	53,69	46,91	33,09	23,15	32,94	45,61	56,45	60,63
10	Bengkalis	2.119	190,10	219,19	220,86	231,37	191,56	167,39	118,08	82,60	117,51	162,74	201,42	216,33
11	Siak	2.116	189,81	218,86	220,52	231,02	191,28	167,13	117,90	82,48	117,33	162,49	201,12	216,01
12	Kepulauan Meranti	809	72,53	83,64	84,27	88,28	73,09	63,87	45,06	31,52	44,84	62,10	76,86	82,55
	<b>Jumlah</b>	<b>36.098</b>	<b>3.238</b>	<b>3.734</b>	<b>3.762</b>	<b>3.941</b>	<b>3.263</b>	<b>2.851</b>	<b>2.011</b>	<b>1.407</b>	<b>2.002</b>	<b>2.772</b>	<b>3.431</b>	<b>3.685</b>

Pit. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	187	17	19	19	20	17	15	10	7	10	14	18	19
2	Kampar	787	71	81	82	86	71	62	44	31	44	60	75	80
3	Rokan Hulu	363	33	38	38	40	33	29	20	14	20	28	34	37
4	Rokan Hilir	343	31	35	36	37	31	27	19	13	19	26	33	35
5	Indragiri Hulu	735	66	76	77	80	66	58	41	29	41	56	70	75
6	Indragiri Hilir	342	31	35	36	37	31	27	19	13	19	26	33	35
7	Kuantan Singingi	619	56	64	64	68	56	49	34	24	34	48	59	63
8	Pelalawan	402	36	42	42	44	36	32	22	16	22	31	38	41
9	Dumai	401	36	41	42	44	36	32	22	16	22	31	38	41
10	Bengkalis	362	32	37	38	39	33	29	20	14	20	28	34	37
11	Siak	314	28	32	33	34	28	25	17	12	17	24	30	32
12	Kepulauan Meranti	171	15	18	18	19	15	13	10	7	9	13	16	17
	<b>Jumlah</b>	<b>5.024</b>	<b>451</b>	<b>520</b>	<b>524</b>	<b>549</b>	<b>454</b>	<b>397</b>	<b>280</b>	<b>196</b>	<b>279</b>	<b>386</b>	<b>478</b>	<b>513</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXIV : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	56	1	2	2	1	2	3	2	8	8	8	8	11
2	Kampar	1.620	28	34	43	48	36	35	25	225	250	275	321	300
3	Rokan Hulu	964	29	33	37	45	37	40	30	148	155	170	115	125
4	Rokan Hilir	1.144	34	55	50	45	41	38	35	106	160	225	200	155
5	Indragiri Hulu	905	23	35	23	40	20	20	15	125	142	174	175	113
6	Indragiri Hilir	951	28	34	34	35	34	30	30	130	155	185	120	136
7	Kuantan Singingi	1.053	43	39	38	39	39	41	27	168	175	175	129	140
8	Pelalawan	1.114	18	26	15	20	10	10	6	250	200	275	150	134
9	Dumai	53	3	3	4	4	3	3	3	5	6	6	6	7
10	Bengkalis	905	32	27	27	30	27	15	8	145	150	185	140	119
11	Siak	1.908	38	42	47	46	42	29	25	250	350	375	300	364
12	Kepulauan Meranti	38	2	2	2	3	3	1	2	5	5	5	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>10.711</b>	<b>279</b>	<b>332</b>	<b>322</b>	<b>356</b>	<b>294</b>	<b>265</b>	<b>208</b>	<b>1.565</b>	<b>1.756</b>	<b>2.058</b>	<b>1.668</b>	<b>1.608</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXV : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kampar	311	28	32	32	34	28	25	17	12	17	24	30	32
3	Rokan Hulu	155	14	16	16	17	14	12	9	6	9	12	15	16
4	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indragiri Hulu	124	11	13	13	14	11	10	7	5	7	10	12	13
6	Indragiri Hilir	155	14	16	16	17	14	12	9	6	9	12	15	16
7	Kuantan Singingi	155	14	16	16	17	14	12	9	6	9	12	15	16
8	Pelalawan	233	21	24	24	25	21	18	13	9	13	18	22	24
9	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bengkalis	31	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3	3
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.166</b>	<b>105</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>65</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>111</b>	<b>119</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXVI : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	1	0,10	0,12	0,12	0,13	0,10	0,09	0,06	0,05	0,06	0,09	0,11	0,12
2	Kampar	679	60,88	70,20	70,73	74,10	61,35	53,61	37,82	26,45	37,63	52,12	64,51	69,28
3	Rokan Hulu	1.069	95,86	110,53	111,37	116,67	96,60	84,40	59,54	41,65	59,25	82,06	101,57	109,08
4	Rokan Hilir	892	79,98	92,23	92,93	97,35	80,60	70,43	49,68	34,76	49,44	68,47	84,75	91,02
5	Indragiri Hulu	291	26,12	30,11	30,34	31,79	26,32	23,00	16,22	11,35	16,14	22,36	27,67	29,72
6	Indragiri Hilir	1.891	169,66	195,63	197,11	206,49	170,97	149,39	105,39	73,72	104,88	145,24	179,77	193,08
7	Kuantan Singingi	606	54,38	62,70	63,17	66,18	54,79	47,88	33,78	23,63	33,61	46,55	57,61	61,88
8	Pelalawan	660	59,16	68,22	68,74	72,01	59,62	52,09	36,75	25,71	36,57	50,65	62,69	67,33
9	Dumai	119	10,65	12,28	12,37	12,96	10,73	9,38	6,61	4,63	6,58	9,12	11,28	12,12
10	Bengkalis	424	37,99	43,81	44,14	46,24	38,29	33,46	23,60	16,51	23,49	32,53	40,26	43,24
11	Siak	423	37,94	43,74	44,08	46,17	38,23	33,41	23,57	16,49	23,45	32,48	40,20	43,17
12	Kepulauan Meranti	162	14,50	16,72	16,84	17,64	14,61	12,77	9,01	6,30	8,96	12,41	15,36	16,50
	<b>Jumlah</b>	<b>7.215</b>	<b>647</b>	<b>746</b>	<b>752</b>	<b>788</b>	<b>652</b>	<b>570</b>	<b>402</b>	<b>281</b>	<b>400</b>	<b>554</b>	<b>686</b>	<b>737</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXVII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	33	3	3	3	4	3	3	2	1	2	3	3	3
2	Kampar	141	13	15	15	15	13	11	8	5	8	11	13	14
3	Rokan Hulu	65	6	7	7	7	6	5	4	3	4	5	6	7
4	Rokan Hilir	61	5	6	6	7	6	5	3	2	3	5	6	6
5	Indragiri Hulu	131	12	14	14	14	12	10	7	5	7	10	12	13
6	Indragiri Hilir	61	5	6	6	7	6	5	3	2	3	5	6	6
7	Kuantan Singingi	111	10	11	12	12	10	9	6	4	6	8	11	11
8	Pelalawan	72	6	7	7	8	6	6	4	3	4	6	7	7
9	Dumai	72	6	7	7	8	6	6	4	3	4	5	7	7
10	Bengkalis	65	6	7	7	7	6	5	4	3	4	5	6	7
11	Siak	56	5	6	6	6	5	4	3	2	3	4	5	6
12	Kepulauan Meranti	30	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>898</b>	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>69</b>	<b>85</b>	<b>92</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXVIII : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	22	-	-	1	2	2	-	1	3	3	3	3	4
2	Kampar	243	4	3	7	8	8	6	7	35	35	40	40	50
3	Rokan Hulu	248	3	4	6	7	5	5	6	40	40	45	40	47
4	Rokan Hilir	118	2	5	5	2	1	1	3	15	15	20	23	26
5	Indragiri Hulu	67	1	2	3	3	4	2	5	5	5	10	15	12
6	Indragiri Hilir	143	3	3	4	5	4	5	3	20	22	24	20	30
7	Kuantan Singingi	110	2	2	3	4	3	2	3	15	10	10	20	36
8	Pelalawan	241	2	3	4	2	2	3	5	30	45	45	55	45
9	Dumai	20	1	2	2	1	1	-	-	1	3	3	3	3
10	Bengkalis	125	3	3	3	6	4	2	4	20	20	20	15	25
11	Siak	295	4	4	7	5	8	3	5	50	50	40	55	64
12	Kepulauan Meranti	9	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1.641</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>236</b>	<b>249</b>	<b>261</b>	<b>290</b>	<b>343</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Lampiran XXIX : Peraturan Gubernur Riau  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 10 Desember 2014

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI  
 SUB SEKTOR PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015**

( Ton )

No	Kabupaten/Kota	Setahun	BULAN											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kampar	66	6	7	7	7	6	5	4	3	4	5	6	7
3	Rokan Hulu	33	3	3	4	4	3	3	2	1	2	3	3	3
4	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indragiri Hulu	26	2	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	3
6	Indragiri Hilir	33	3	3	4	4	3	3	2	1	2	3	3	3
7	Kuantan Singingi	33	3	3	4	4	3	3	2	1	2	3	3	3
8	Pelalawan	49	4	5	5	5	4	4	3	2	3	4	4	5
9	Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bengkalis	7	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
11	Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>246</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>

Plt. GUBERNUR RIAU  
 WAKIL GUBERNUR.

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN